

No. 207 Mei 2023

BaktiNews

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MEMPERKUAT LAYANAN
BERBASIS KOMUNITAS**

MENYAMBUT HARI BARU DI DAKA DANU

**MENDORONG PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF
DI LOMBOK TIMUR**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



Daftar Isi

BaKTI:News

Mei 2022

No. 207

- 1** Memperkuat Layanan Berbasis Komunitas
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 7** Edukasi Penanggulangan Hoaks dan Misinformasi Kesehatan oleh Masyarakat
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 12** Apa itu Kota HAM?
Oleh **ANITA DHEWY**
- 15** Berbeda Bukan untuk Dibedakan
Oleh **ITA IBNU**
- 18** Menyambut Hari Baru di Daka Danu
Oleh **SELVIANUS KATODA**
- 21** Urgensi Pengembangan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah
Oleh **MARYAM, ADE NURIADIN**
- 25** Kesehatan Mental Punya Peranan Besar Dalam Perekonomian - Kita Membutuhkan Tolak Ukur Selain PDB
Oleh **RAPHAEL GUNAWAN HASUDUNGAN, ANDREA NATALIE NATSKY, JO-AN OCCHIPINTI**
- 28** Cara yang Bisa Dilakukan Untuk Menghadapi Udara Buruk Penyebab Perubahan Iklim
Oleh **FINASTRI ANNISA**
- 31** Para Nelayan Maluku Membuktikan Industri Tuna Harusnya Tak Perlu Merusak Lingkungan
Oleh **EKO RUSDIANTO**
- 37** Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif di Kabupaten Lombok Timur
Oleh **MAHARANI**
- 40** Diskusi IG Live Story @infobakti dan Podcast Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Ilustrasi cover: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI



MEMPERKUAT LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Suatu waktu, terjadi perdebatan dalam satu rapat, seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas pada bagian hukum sekretariat daerah di sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan mempertanyakan, mengapa harus ada tenaga pendamping atau paralegal di tingkat desa/kelurahan, dan mengapa mereka harus diakui dan dilegalkan oleh pemerintah daerah. Menurut si ASN ini, dengan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah, kemungkinan tenaga-tenaga sukarelawan ini akan memanfaatkan atributnya untuk mencari keuntungan pribadi.

Pertanyaan tersebut bisa dimaklumi, karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang sama dalam mengetahui dan menghadapi masalah tertentu. Namun, kekhawatirannya sangat berlebihan. Pasalnya orang-orang yang menjadi 'klien' atau didampingi oleh tenaga pendamping, umumnya adalah warga miskin dan marginal. Jadi yang terjadi bukan keuntungan ekonomi sebagaimana pengacara profesional, melainkan kerugian waktu, tenaga, dan materi.



Layanan di Komunitas

Istilah pendamping dapat ditemukan pada beberapa instrumen hukum nasional. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022) menyebutkan, pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 1 angka 14).

Pendamping merupakan organ penting dalam layanan berbasis komunitas (LBK). LBK adalah serangkaian upaya yang dilakukan komunitas untuk mewujudkan tersedianya



Foto: Dok. Program INKLUSI-Yayasan BaKTI

layanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan di lingkungan sekitarnya. Komunitas yang dimaksud dapat berbasis wilayah (desa, kelurahan, negeri, lembang), berbasis kelompok dengan latar belakang tertentu (kelompok agama, organisasi profesi), ataupun berbasis institusi (sekolah, panti).

Sebagai organisasi di komunitas, LBK mempunyai posisi penting secara sosial, di mana lembaga layanan negara/pemerintah hanya tersedia di tingkat kabupaten/kota. Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU (Kemitraan

Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), yang kemudian dilanjutkan dengan Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) mendorong pembentukan dan penguatan kelompok di tingkat desa/kelurahan, di antaranya untuk memberikan pelayanan korban kekerasan dan perlindungan sosial.

Pembentukan kelompok yang disebut sebagai kelompok konstituen, forum pemerhati desa, atau kelompok kerja (Pokja) Inklusi, yang menjadi lembaga layanan di komunitas, tidak sekadar menambah jumlah lembaga/organisasi



di tingkat desa/kelurahan, tetapi mengisi ruang kosong yang seharusnya merupakan tugas negara/pemerintah. Disebut “ruang kosong” karena negara/pemerintah tidak mempunyai aparat profesional di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang dapat menangani korban kekerasan, terutama perempuan dan anak.

Negara/pemerintah telah mempunyai struktur hingga tingkat terendah semacam RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga). Namun, sebagai wakil pemerintah tingkat terendah, mereka tidak mampu, tidak mempunyai perspektif, bahkan tidak tahu, apa yang harus dilakukan ketika menemukan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, apalagi kalau kekerasan seksual.

Layanan Korban Kekerasan

Pemerintah telah membentuk UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas-Perlindungan Perempuan dan Anak) yang sebelumnya bernama

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terlepas dari kekurangan dan permasalahannya, UPTD PPA/P2TP2A di beberapa daerah telah menjadi lembaga layanan yang cukup baik untuk perlindungan perempuan dan anak.

Namun, UPTD PPA/P2TP2A tidak mempunyai petugas di tingkat desa/kelurahan. Karena itu, inisiatif-inisiatif yang dilakukan berbagai organisasi dan masyarakat untuk menyediakan layanan hingga di tingkat desa/kelurahan perlu didukung dan diapresiasi. Pasalnya, pengadaan layanan bukanlah perkara mudah dan tidak murah. Lembaga layanan membutuhkan tempat (sekretariat dan rumah aman/shelter) dan sumber daya manusia yang tidak hanya mumpuni, tetapi juga harus mempunyai empati dan pemihakan terhadap korban.

Pengalaman kelompok konstituen yang di dalamnya membentuk layanan untuk korban



Foto-foto: Dok. Program INKLUSI-Yayasan BAKTI

kekerasan dan layanan untuk perlindungan sosial, memberi pelajaran bahwa penyediaan layanan di tingkat komunitas membutuhkan kerelawanan, pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi. Mereka-mereka yang telah mempunyai pengalaman dalam memberikan pelayanan terhadap warga, seperti Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, pun tidak mudah menjadi pendamping, karena penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal, selain membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, juga empati terhadap korban yang mempunyai permasalahan yang kompleks.

Korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, apalagi mereka juga merupakan masyarakat miskin dan marginal, tentu mempunyai permasalahan dan suasana psikologi yang sangat kompleks. Karena sebelum menjadi korban kekerasan, mereka telah menjadi korban karena stigma dan kondisi sosial yang dialaminya.

Karena itu, penguatan pendamping sebagai orang yang mendampingi dan menangani korban kekerasan tidak sekadar memberi pengetahuan dan keterampilan, tetapi harus mengubah perspektif dan sikap terhadap kelompok miskin, marginal, dan rentan. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, apalagi jika menyandang disabilitas, maka dia telah menjadi korban yang kesekian kalinya, atau kekerasan yang dialaminya berlapis. Sehingga pendampingan dan penanganan yang diberikan oleh pendamping di kelompok konstituen sebagai LBK juga dapat memperkuat dan memberdayakan korban.

Layanan Perlindungan Sosial

Kelompok konstituen juga memberikan layanan terkait dengan perlindungan sosial, seperti membantu pengurusan/pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan BPJS Kesehatan.



Bagi sebagian orang, pengurusan surat-surat yang digunakan sebagai identitas kependudukan dan kewarganegaraan adalah hal yang mudah. Namun, bagi masyarakat miskin dan marginal, surat-surat tersebut merupakan barang mewah dan mahal. Apalagi kantor-kantor yang menerbitkan surat-surat itu harus dijangkau dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang memberatkan bagi masyarakat miskin dan marginal.

Keberadaan kelompok konstituen menjadi jembatan untuk menghubungkan masyarakat miskin dan marginal. Dukungan kelompok konstituen yang melakukan pendataan, kemudian melakukan advokasi untuk penerbitan KTP dan KK bagi disabilitas, terutama disabilitas mental yang selama ini mengalami stigma dan disingkirkan, seperti ODDP (orang dengan disabilitas psikosial)/ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), adalah sesuatu yang baik bagi

pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas mental sebagai warga negara.

Bekerja dengan Data

Kelompok konstituen yang menyediakan LBK diperkuat untuk bekerja dengan data. Dengan begitu kelompok melakukan advokasi berdasarkan bukti (*evidence based*). Pada tahap awal kelompok konstituen melakukan pendataan untuk kelompok miskin, marginal, dan rentan, seperti perempuan miskin, disabilitas, transgender, lanjut usia, suku minoritas, dan penganut agama lokal.

Data yang diperoleh kelompok konstituen berbeda dengan data yang dimiliki oleh pemerintah. Sebagai contoh, kelompok konstituen melakukan pendataan di 15 desa/kelurahan di wilayah program (kabupaten/kota), kecuali Kabupaten Maros sebanyak 12 desa. Data untuk jumlah penyandang disabilitas yang diperoleh sangat tinggi (Tabel 1),



Foto-foto: Dok. Program INKLUSI-Yayasan BaKTI

jauh di atas data disabilitas yang tercatat di pemerintah.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tiga faktor. **Pertama**, tenaga pendata adalah masyarakat setempat yang dilatih untuk menjangkau kelompok miskin, marginal, dan rentan, sehingga mereka dapat mengetahui siapa-siapa yang dikategorikan sebagai miskin, marginal, dan rentan. **Kedua**, pendataan yang dilakukan kelompok konstituen berbasis RT/RW yang merupakan unit terkecil administrasi kependudukan, sehingga memudahkan penjangkauan. **Ketiga**, pendataan menggunakan ukuran keragaman disabilitas yang diharapkan menjangkau disabilitas yang sebelumnya tidak pernah dijangkau oleh pemerintah. Ini terbukti karena selama ini pemerintah mengenal disabilitas dari melihat tongkat dan kursi roda.

Data yang diperoleh kelompok konstituen ketika diekspos mendapat respons yang beragam. Pemerintah Kabupaten Maros, mulai dari Bupati Maros, Chaidir Syam, Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kepala Dinas Sosial mengapresiasi data tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Nuryadi menggunakan format yang digunakan kelompok konstituen untuk melakukan pendataan bagi disabilitas di seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Maros.

Di Kota Parepare, pemerintah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menggunakan data tersebut untuk mengubah PIW (Pagu Indikatif Wilayah) dengan memasukkan disabilitas sebagai faktor penghitung alokasi PIW, yang sebelumnya hanya mengakomodasi perempuan dan anak. Di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Parepare dikenal PIW sebagai alokasi anggaran yang merupakan usulan di tingkat kelurahan.

Sebagai organisasi di tingkat desa/kelurahan, Kelompok Konstituen dibentuk dan diperkuat untuk menjadi mitra pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dan perlindungan warga, terutama mereka yang selama ini tergolong kelompok miskin, marginal, dan rentan. Karena itu, metode dan pendekatan yang digunakan kelompok konstituen harus berada pada kerangka kerja pemerintah. LKB sebagai layanan di komunitas yang dikembangkan oleh Kelompok Konstituen dihubungkan dengan lembaga layanan yang tersedia di negara. Karena itu, pendamping yang terlatih harus diakui oleh pemerintah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



EDUKASI PENANGGULANGAN HOAKS DAN MISINFORMASI KESEHATAN OLEH MASYARAKAT

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Perubahan sosial dapat terjadi karena adanya perubahan pola berpikir, struktur, kehidupan, atau pandangan masyarakat mengenai suatu hal. Awalnya, perubahan nilai ini hanya terjadi dalam suatu komunitas sosial. Di mulai dari terciptanya gagasan atau ide, seperti cita-cita atau kebutuhan. Jika ide itu akhirnya menyebar ke seluruh anggota komunitas, akan menghasilkan perubahan dalam sistem sosial, sebagai akibat dari penerimaan atau penolakan suatu inovasi. Bila perubahan itu diterima, ini akan menimbulkan perubahan sikap, pengalaman, persepsi masyarakat, bahkan refleksi atas perubahan yang terjadi.

Meskipun perubahan itu niscaya atau pasti terjadi, namun perubahan dapat diarahkan menuju sesuatu yang lebih baik atau bermanfaat. Sebuah perubahan dapat berasal dari luar masyarakat seperti adanya pengaruh perubahan alam atau pengaruh budaya lain. Namun perubahan juga dapat berasal dari internal masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri seperti penemuan atau pengetahuan baru, konflik sosial atau dinamika masyarakat. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat pasti akan mengalami suatu perubahan. Hal ini terjadi karena setiap individu dan anggota kelompok masyarakat tersebut memiliki pemikiran dan kemampuan untuk terus berkembang dari waktu ke waktu.

Hoaks dan Pengaruhnya Terhadap Pola Pikir Masyarakat

Di era globalisasi saat ini, arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat melalui berbagai perantara media. Dari kondisi tersebut, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang sebagian besar belum memiliki pemahaman yang cukup dalam cara memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini yang serba cepat. Salah satu media penyebaran informasi yang sangat masif adalah melalui media sosial yang didukung dengan adanya fitur 'suka' dan 'berbagi' yang semakin mendukung

lajunya penyebaran informasi. Sayangnya belum tentu semua informasi yang disebar dan diterima oleh masyarakat adalah berita benar. Tidak sedikit dari informasi yang beredar dan dikonsumsi masyarakat adalah informasi salah atau hoaks.

Ada beberapa penyebab kenapa masyarakat mudah terpengaruh dan percaya pada informasi hoaks, yaitu:

- Hanya membaca judul, dan tidak membaca isi keseluruhan dari suatu berita.
- Hanya mempercayai sumber tertentu dan terlalu "mengagungkan" sumber tersebut.
- Tidak mempercayai informasi dari sumber lain yang dianggap berbeda golongan atau tidak sependapat.
- Sebagian besar orang Indonesia masih tidak bisa membedakan antara satir dan hoaks. Ketika ada kabar yang dianggap penting atau mewakili perasaan saat itu, mayoritas masyarakat akan langsung membagikannya, bahkan tanpa membaca isi beritanya terlebih dahulu.
- Kebanyakan orang akan membenarkan suatu informasi berdasarkan tingkat keseringan mereka melihat kabar tersebut di linimasa media sosial.
- Enggan untuk mencari kebenaran berita dan melakukan verifikasi ulang, beberapa bahkan tidak tahu bagaimana caranya.

Sebuah ajakan semacam "*share=berpahala*", "*like=amin*" atau "*komentar=membantu*" sudah cukup membuat banyak orang percaya dengan berita yang disebar.

Salah satu hoaks yang paling banyak beredar adalah tentang kesehatan. Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa informasi kesehatan adalah salah satu layanan dan informasi yang paling sering dikunjungi masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa kemungkinan masyarakat kita terpapar hoaks mengenai kesehatan cukup besar. Salah satu pola pikir masyarakat yang sulit diubah juga adalah persepsi mereka tentang kesehatan. Hal



ini dikarenakan persoalan kesehatan adalah persoalan yang krusial dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melibatkan Masyarakat dalam Penanggulangan Hoaks dan Misinformasi Kesehatan

Bagaimana cara yang tepat menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang tidak kita kenali? Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendekati orang yang dekat dengan kelompok masyarakat tersebut. Orang ini juga dapat berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Orang yang mereka dengarkan dan percaya pendapatnya. Tentu saja, mengubah pola pikir masyarakat tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu dan proses hingga mereka dapat menerima pemahaman baru hingga terjadi perubahan pola pemikiran mereka.

Sebagai upaya menciptakan perubahan sosial masyarakat dalam menghadapi hoaks dan

misinformasi kesehatan, maka program *Social Behaviour Change (SBC)* yang didukung oleh UNICEF melalui Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas Komunikator untuk Penanggulangan Hoaks dan Misinformasi Kesehatan dengan Teknik Komunikasi Antar Pribadi. Kegiatan yang berlangsung pada 6-16 Maret 2023 ini, melibatkan 519 orang peserta dari empat wilayah sasaran program yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Bone dan Wajo. Para peserta ini berasal dari berbagai unsur yaitu tenaga kesehatan (perwakilan Puskesmas dan kader posyandu), kelompok-kelompok masyarakat (Kelompok Informasi Masyarakat, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan Fasilitator Masyarakat), terdapat pula unsur dari siswa-siswi SMA/Sederajat yang dimaksudkan untuk mewakili kaum muda di masyarakat.

Kegiatan ini difasilitasi oleh lima orang *trainer* yang telah dilatih sebelumnya dalam



Foto-foto: Dok. Yayasan BaKTI

Training of Trainer Penanggulangan Hoaks dan Misinformasi Kesehatan. Dalam kegiatan ini, para komunikator memperoleh pengetahuan dan mempraktekan teknik Komunikasi Antar Pribadi (KAP) yang berguna untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Selain itu, para peserta juga memperoleh penguatan literasi digital meliputi pengenalan internet dan media sosial, perlindungan data pribadi dan identifikasi informasi benar dan hoaks.

Menedukasi Masyarakat dengan Teknik Komunikasi Antar Pribadi

Setelah memperoleh pengetahuan melalui Penguatan Kapasitas Komunikator untuk Penanggulangan Hoaks dan Misinformasi Kesehatan dengan Teknik Komunikasi Antar Pribadi, para peserta yang selanjutnya disebut sebagai komunikator, kemudian menedukasi masyarakat di sekitar mereka tentang cara menanggulangi hoaks dan misinformasi

kesehatan. Sebagai bagian dari masyarakat, tenaga kesehatan merupakan pihak yang cukup didengar dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu wilayah. Begitu pula dengan tokoh atau perwakilan kelompok masyarakat yang tentu lebih dikenal dan dipercaya oleh suatu masyarakat. Anak muda dalam pergaulannya sesama anak muda pun dapat didengarkan dan lebih mengerti cara melakukan komunikasi dengan teman sepergaulan mereka. Karena itulah, pelibatan sejumlah unsur masyarakat dalam kegiatan ini adalah untuk memudahkan komunikasi dan penyebaran pengetahuan kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Menggunakan teknik komunikasi antar pribadi yang telah dipelajari bersama pada penguatan kapasitas komunikator sebelumnya, para komunikator selanjutnya menedukasi masyarakat di sekitar mereka. Proses edukasi ini terus berlangsung hingga April 2023 untuk mencapai target 30 ribu orang yang teredukasi.



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Dalam perubahan perilaku, komunikasi menjadi proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau memengaruhi perilakunya. Perubahan pendapat ini bisa terjadi saat proses komunikasi berlangsung atau mampu pula setelahnya. Hal tersebut tergantung bagaimana penyampaian yang dilakukan sang komunikator. Perubahan perilaku dapat terjadi apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dikemukakan oleh komunikator dengan komunikan. Penyampaian ini juga tergantung pada kepercayaan yang diperoleh oleh komunikator dari para komunikan. Karena itu, metode komunikasi antar pribadi menjadi salah satu topik yang disampaikan pada penguatan kapasitas komunikator dan selanjutnya digunakan oleh komunikator sebagai metode komunikasi yang efektif untuk melakukan

perubahan sosial di masyarakat. Dengan tiga prinsip komunikasi antar pribadi yaitu bangun keakraban, saling berbicara dan mendengarkan, dan mengunci komitmen dapat menjadi sebuah langkah awal untuk menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Terutama perubahan pola pikir mereka dalam menghadapi berbagai informasi kesehatan yang mereka peroleh.

Melibatkan unsur masyarakat sendiri sebagai agen perubahan adalah upaya untuk mewujudkan perubahan sosial secara internal dalam masyarakat menuju perubahan pola pikir yang diharapkan. Dengan meningkatnya kemampuan literasi digital masyarakat, khususnya mengenai kesehatan, dapat meningkatkan pula cakupan kesehatan masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program Kerja sama Yayasan BaKTI-UNICEF dapat menghubungi info@bakti.or.id



Ilustrasi: Idris Djunaed/Yayasan BaKTI

APA ITU KOTA HAM?

Kota HAM adalah kota yang menerapkan hak asasi manusia termasuk perempuan dan kelompok marginal untuk para penghuni kotanya

Oleh **ANITA DHEWY**

Distilah hak asasi manusia atau HAM tentu sudah akrab di telinga kita. Bagaimana dengan Kota HAM? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Kota HAM? Apa yang membuat sebuah kota layak disebut sebagai Kota HAM?

Kota Hak Asasi Manusia atau Kota HAM sebagai sebuah konsep sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Namun implementasi dari konsep tersebut menjadi sebuah gerakan global yang meletakkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah daerah baru berlangsung pada satu dekade terakhir.

Di tingkat global, gerakan ini diprakarsai oleh pemerintah Kota Metropolitan Gwangju di Korea Selatan dengan menggelar Forum Kota HAM Sedunia sejak 2011. Gerakan global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan dari PBB yang pada 2013 mengeluarkan Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM.

Apa itu Kota HAM?

Merujuk pada buku Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia, gagasan tentang Kota HAM didasarkan pada pengakuan terhadap kota sebagai pemain kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi. Secara umum mengacu pada sebuah kota yang pemerintah dan penduduknya, secara moral dan hukum, diatur dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Konsep ini diluncurkan pada tahun 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi internasional non profit yang bergerak di bidang pelayanan. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia yang berlangsung setiap tahun di kota Gwangju, Korea Selatan.

Sebenarnya tidak ada konsensus yang tetap mengenai definisi Kota HAM. Namun kita bisa belajar dari berbagai pengalaman baik yang menjadi rujukan masyarakat internasional. Seperti gambaran tentang kota HAM yang diuraikan oleh Gerakan masyarakat untuk pendidikan HAM yang menjadi salah satu motor dari advokasi Kota HAM.

“Kota atau komunitas yang terdiri dari mereka yang menginginkan kerangka kerja hak asasi manusia menjadi pengarah bagi pembangunan kehidupan komunitas. Persamaan dan nondiskriminasi merupakan nilai-nilai dasar. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi rasa takut, dan pemiskinan. Sebuah kota yang memberi akses pada pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup. Bukan sebagai hadiah melainkan sebagai

bentuk realisasi hak asasi manusia,” (PDHRE, 2007).

Sementara Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2011 mendefinisikan kota HAM sebagai sebuah komunitas lokal maupun proses sosial politik dalam konteks lokal. HAM memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan. Konsep kota HAM juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan konsep kota HAM dirintis oleh INFID bersama Komnas HAM dan ELSAM. Lembaga tersebut melakukan advokasi pelembagaan konsep kota HAM dengan menggandeng pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemenuhan kewajiban HAM oleh pemerintah kabupaten atau kota sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga.

Selanjutnya sejak 2014 berlangsung Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM. Kegiatan ini merupakan forum untuk bersilaturahmi, bertukar pengetahuan, ide, dan berbagi pengalaman tentang praktik-praktik nyata yang telah berhasil diterapkan dalam membangun kabupaten/kota yang selaras dengan nilai-nilai HAM. Agenda tahunan ini diselenggarakan oleh Komnas HAM, INFID, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Kota HAM Melindungi Kelompok Rentan yang Inklusif Harus Libatkan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik atau intelektual atau mental dalam jangka waktu yang lama dan karena keterbatasannya itu menimbulkan hambatan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh. Karenanya diperlukan adanya akomodasi dan aksesibilitas agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh seperti masyarakat lainnya yang tanpa disabilitas.

Aksesibilitas harus dibangun sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sehingga aksesibilitas seharusnya membuat para penyandang disabilitas bisa menikmati pembangunan, dan segala fasilitas, termasuk sarana dan prasarana publik yang ada di kota.

Namun sayangnya yang sering terjadi adalah sekalipun sudah tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas tetapi fasilitas tersebut tidak dapat digunakan dengan baik. Misalnya sudah tersedia *guiding block* tetapi ternyata putus di tengah jalan atau justru menjadi tempat parkir motor atau gerobak dagangan sehingga membuat teman-teman disabilitas yang menggunakan jalur tersebut menjadi terganggu atau tidak nyaman.

Begitu juga dengan tangga. Ada tangga tetapi curam sehingga teman-teman disabilitas pengguna kursi roda membutuhkan bantuan orang lain untuk melewati ram tersebut.

Lalu akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam karena setiap penyandang disabilitas mempunyai latar yang berbeda. Bagi Mahreta misalnya, sebagai tuna netra sejak kecil dia merasa cocok dengan braille. Tetapi bagi mereka yang baru menjadi tuna netra setelah dewasa, mungkin tidak terlalu clear dengan braille, jadi mereka lebih cocok dengan *screen reader*, dsb.

Pada dasarnya penyandang disabilitas adalah bentuk dari keragaman yang ada. Sama seperti tinggi badan, warna kulit, dan bentuk rambut yang beragam, penyandang disabilitas juga demikian. Ada penyandang disabilitas yang berjalan dengan menggunakan kursi roda atau alat bantu, ada yang melihat dengan menggunakan *screen reader* ataupun perabaan, ada juga yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat.

Soal keragaman kebutuhan penyandang disabilitas ini juga tidak selalu bisa dijawab oleh teknologi karena ada faktor lain yang menghambat. Sebagai seorang disabilitas ganda, pengguna alat bantu dengar di telinga kiri kanan, ia tidak bisa mengakses komunikasi dengan baik pada saat tidak bisa melihat gerak

bibir. Sementara pandemi membuat orang menggunakan masker ketika berkomunikasi. Banyak penyandang disabilitas menggunakan *live transcript*, aplikasi di *handphone* untuk mengubah suara menjadi tulisan. Tetapi aplikasi selalu bermasalah pada saat *sound system* bergema. Begitu juga alat bantu dengar yang ia gunakan, menjadi tidak berfungsi dengan baik jika ada gema.

Contoh lain, banyak masyarakat yang berpikir bahwa untuk penyandang disabilitas tuli yang dibutuhkan adalah bahasa isyarat. Ketika sudah ada juru bahasa isyarat artinya sudah selesai padahal tidak demikian karena disabilitas tuli juga beragam.

Begitu juga dengan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pemusatan perhatian atau hambatan untuk menangkap informasi. Ketika melihat orang berbicara di layar, ia akan terbantu jika ada teks. Sayangnya fasilitas *running text* tidak selalu tersedia.

Selain itu desain kota yang *smart* sering kali juga meninggalkan penyandang disabilitas. Teknologi yang digunakan sangat tinggi tetapi hal-hal sederhana yang bisa dimasukkan dalam teknologi agar penyandang disabilitas bisa mengakses itu tidak dilakukan. Untuk itu menurut Dante proses pembangunan kota harus melibatkan penyandang disabilitas.

Hal lain yang juga penting adalah memutus stigma terhadap penyandang disabilitas. Dante menuturkan pelanggaran HAM dan kekerasan terjadi karena stigma terhadap penyandang disabilitas masih tinggi. Karena itu Kementerian Keagamaan bisa memberikan layanan untuk memutus stigma. Misalnya dengan memberikan pesan-pesan kepada calon pengantin jika nanti punya anak bisa jadi anaknya disabilitas, bisa jadi anaknya berteman dengan anak lain yang disabilitas, dan lain sebagainya. Artinya pemahaman atau perspektif kita terhadap penyandang disabilitas harus ditumbuhkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari

<https://www.konde.co/2023/04/apa-itu-kota-ham-sudahkah-warga-minoritas-jadi-bagian-dari-kota-ham.html/>



BERBEDA BUKAN UNTUK DIBEDA-BEDAKAN

Tuhan tidak pernah salah menciptakan sesuatu, termasuk anak-anak yang terlahir dengan *down syndrome*”

A. Nurfitri Balasong - Ketua Komunitas Sahabat Sindroma Down Istimewa (SSDI) Makassar.

Oleh **ITA IBNU**

Down *Syndrome* adalah kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21. Kelainan yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada 1866 oleh Dr. John Langdon Down. Karena ciri-ciri yang tampak berbeda seperti tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil dan hidung datar menyerupai orang Mongoloid maka sering juga dikenal dengan mongolisme. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Down Syndrome*, organisasi internasional menyepakati untuk memperingati Hari *Down Syndrome* Sedunia setiap tanggal 21 Maret, yang dipilih karena *Down Syndrome* disebabkan oleh trisomi kromosom ke-21, yang mengakibatkan ada tiga salinan kromosom 21 pada sel-sel tubuh.

Tujuan dari peringatan ini selain untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Down Syndrome*, mempromosikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi mereka, juga untuk merayakan prestasi dan kemampuan penyandang *down syndrome*. Dengan peringatan ini, masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan dan hak penyandang *Down Syndrome*, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka untuk meraih potensi maksimal mereka dan menjadi bagian yang aktif dan berkontribusi dalam masyarakat.

Pentingnya peringatan Hari *Down Syndrome* Sedunia terletak pada fakta bahwa masih terdapat banyak stigma dan diskriminasi yang dialami oleh penyandang *Down Syndrome*, yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang *Down Syndrome*, dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai individu yang setara.

Beberapa contoh stigma yang seringkali diterima oleh penyandang sindrom *Down* meliputi: Dihambat dalam mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan teman sebaya mereka. Mendapatkan perlakuan berbeda dan

dianggap kurang mampu dalam kehidupan sosial. Dibatasi dalam kesempatan pekerjaan dan dianggap tidak mampu bekerja seperti orang lain. Dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sebagai beban bagi keluarga mereka. Dipandang rendah dan dianggap tidak mampu melakukan aktivitas yang dianggap mudah bagi orang lain.

Selain stigma, penyandang *down syndrome* masih sering diabaikan dalam proses pembangunan. Kurangnya aksesibilitas dapat menjadi kendala bagi penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas, layanan, dan infrastruktur publik yang ada, seperti transportasi umum, bangunan publik, dan ruang publik. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Penyandang *down syndrome* seringkali membutuhkan dukungan khusus untuk meraih potensi maksimal mereka. Namun, dukungan ini seringkali tidak tersedia, baik itu dukungan medis, rehabilitasi, atau dukungan sosial dan psikologis. Diskriminasi dapat memengaruhi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang kurang memahami kebutuhan dan hak penyandang disabilitas, dan karena itu kurang peduli dan mendukung mereka. Hal ini dapat mengakibatkan marginalisasi dan pengecualian dalam berbagai aspek kehidupan.

Hal ini tentu sangat memengaruhi kualitas hidup penyandang *down syndrome*. Meskipun sejumlah peraturan nasional maupun internasional untuk melindungi hak-hak penyandang *down syndrome* namun stigma dan diskriminasi masih saja terus terjadi. Hak-hak penyandang disabilitas di antaranya adalah hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, akses

terhadap layanan publik, serta hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Padahal penyandang *down syndrome* jika diberikan akses, menghilangkan diskriminasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak penyandang disabilitas maka dapat memaksimalkan potensi mereka untuk tumbuh, berkembang dan berdaya. Menurut Fitri, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dijamin, serta memberikan dukungan dan akses terhadap fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Anak dengan *down syndrome* memiliki bakat dan potensi yang sama dengan anak lainnya, meskipun mungkin perlu adanya pendekatan dan strategi yang berbeda untuk memaksimalkan bakat mereka. Anak *down syndrome*, menurut A. Nurfitri Balasong, adalah seorang peniru ulung. Mereka mudah menyerap informasi dan menirukannya dalam kehidupan hari-hari. Sebab itu, Fitri Balasong melanjutkan, tidak terlalu sulit mengajarkan anak-anak *Down syndrome*. Terlepas dengan berbagai hambatan yang dimiliki seorang anak *Down syndrome*, mereka selalu terlihat ceria, penyayang, dan mudah bergaul.

Menurut Fitri Balasong, beberapa aktivitas yang dapat memaksimalkan potensi anak *down syndrome* adalah dengan bermain musik, menari dan olah raga. Fitri Balasong sendiri adalah ibu dari seorang anak perempuan penyandang *down syndrome* yang memiliki bakat sebagai penari dan atlet. Fitri bersama ibu-ibu yang memiliki anak *down syndrome* kemudian mendirikan komunitas Sahabat Syndrome *Down* Istimewa (SSDI) Makassar. Komunitas ini aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *down syndrome* melalui diskusi baik *online* maupun *offline*, aktif terlibat menjadi pembicara dalam berbagai event, serta mendorong berbagai pihak untuk memberikan ruang bagi anak-anak *down syndrome* untuk unjuk bakat mereka seperti saat anak-anak binaan SSDI menari saat perhelatan F8 Tahun 2022 lalu di Anjungan Pantai Losari Makassar.

Setiap anak dengan sindrom *Down* memiliki potensi unik dan kemampuan yang berbeda, oleh karena itu penting bagi orang tua dan keluarga untuk memberikan dukungan dan lingkungan yang sesuai untuk membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Berikut ini tips untuk memaksimalkan bakat anak dengan *down syndrome*:

Fokus pada potensi anak. Keluarga harus jeli mengidentifikasi dan potensi anak akan membantu mereka merasa lebih percaya diri dan terinspirasi untuk terus belajar dan berkembang. Keluarga berperan penting dalam mantu anak menemukan kegiatan atau hobi yang mereka sukai dan berikan dukungan untuk memaksimalkan kemampuan mereka.

Berikan pengalaman yang beragam. Mereka dapat belajar dari berbagai pengalaman dan lingkungan yang berbeda. Dengan memperkenalkan mereka pada kegiatan yang berbeda-beda seperti seni, musik, olahraga, dan kegiatan sosial untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka.

Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Anak dengan *down syndrome* mungkin perlu pendekatan dan metode pembelajaran yang berbeda untuk membantu mereka memahami materi. Pada umumnya mereka menyukai gambar atau bahan visual dapat membantu mereka memahami konsep, selain itu memberikan banyak simulasi dan kegiatan fisik lainnya.

Anak dengan *down syndrome* perlu dilatih menjadi lebih mandiri dengan memberikan kesempatan dan dukungan untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari. Misalnya, latih mereka untuk mandi, berpakaian, dan makan sendiri.

Dukungan dari keluarga sangat penting bagi perkembangan dan kesuksesan anak *Down syndrome*. Dengan memahami potensi dan bakat anak serta memberikan dukungan yang tepat, keluarga dapat membantu anak *Down syndrome* mencapai potensi terbaik mereka dan hidup secara mandiri dan bahagia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lengkap kunjungi Podcast Basuara melalui tautan <http://bit.ly/basuara>

MENYAMBUT HARI BARU DI DAKA DANU

"Tana Tilu, Daiti Ihu luku mapa tiyang, tana mapa paku."

(Kami harus pergi mencari mata air untuk minum dan tanah basah, agar menanam sayur untuk dimakan – Bahasa Sumba Anakalang, dikutip dari Buku "Merajut Harmoni")

Oleh **SELVIANUS KATODA**

M

asyarakat Marapu di Sumba Barat Daya merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai dan tradisi leluhur di tengah perkembangan dunia modern yang semakin pesat. Tradisi Marapu turut mengambil peran dalam memberikan arahan bagi kehidupan masyarakat (*way of life*), salah satunya dalam menentukan mata pencaharian masyarakat. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang-orang Marapu terlahir untuk menjadi petani. Jika orang-orang Indonesia timur seperti suku Bugis pada umumnya identik bekerja sebagai pelaut dengan semboyan "Nenek

Foto: Dok. wifor.id





Moyangku Orang Pelaut,” sebanyak 85% masyarakat Marapu berprofesi sebagai petani. Profesi sebagai petani diwariskan secara turun temurun dan telah berlangsung sejak dulu kala. Para petani memiliki keyakinan bahwa tanah merupakan sumber penghidupan yang kekal. Berbagai komoditas seperti jagung, sayur, buah, hingga jambu mete, menjadi hasil pertanian

unggulan. Walaupun daerah Sumba Barat Daya memiliki berbagai tantangan seperti cuaca yang ekstrim, perbedaan kondisi kesuburan tanah, dan permasalahan air di beberapa wilayah, hal ini tidak menyurutkan semangat masyarakat Marapu untuk terus bercocok tanam.

Kepercayaan inilah yang mendorong Kelompok Tani (Poktan) Daka Danu di Desa Pero,



Foto: Dok. wifor.id

Wewewa Barat tak pernah menyerah ketika menggarap lahan pertanian mereka. Sebelum beralih menanam sayur-sayuran, anggota poktan Daka Danu berprofesi sebagai petani tembakau. Poktan Daka Danu beranggotakan 20 orang petani yang terdiri dari 17 laki-laki dan 3 orang perempuan. Setiap hari, anggota poktan selalu bersemangat mencangkul, membuat bedengan

untuk ditanami cabai rawit, dan merawat tanaman sayur yang mereka tanam.

Bak gayung bersambut, Poktan Daka Danu bergabung menjadi salah satu poktan dampingan dalam Program PERMATA (Peningkatan Mata Pencaharian Pertanian Melalui Pendekatan Terpadu) yang didukung oleh William and Lily Foundation (WLF) dan diimplementasikan oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera (YBTS) di Sumba Barat Daya sejak tahun 2021. Berbagai kegiatan pendampingan dilakukan melalui pelatihan materi dan praktik di lapangan. Pada awalnya, Poktan Daka Danu menanam sebanyak 1.300 pohon cabai. Walaupun adanya curah hujan yang tinggi, Poktan Daka Danu berhasil memanen 1.200 pohon cabai.

“Saat ini kami sudah berhasil memanen 8 kilogram cabai, terjual dengan harga 50 ribu per kilogram dan bisa mendapatkan 500 ribu sampai 600 ribu rupiah dari penjualan sayuran setiap minggu,” ucap Trimuliana Malo, salah satu anggota Poktan.

“Kami sangat bahagia dengan kehadiran program ini karena kami banyak belajar tentang cara menanam yang baik dan benar. Walaupun kami tidak muda lagi, kami selalu merasa segar dan muda ketika di kebun” – Mikael Malo Bili (Ketua Poktan Daka Danu).

Hasil panen cabai tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para petani. Poktan Daka Danu juga berinisiatif untuk mengupayakan ketersediaan air yang menjadi kebutuhan vital bagi pertanian. Para anggota Poktan ini juga berjanji untuk terus belajar dan membagikan pengetahuan yang mereka peroleh dari Program PERMATA kepada para petani lainnya di Wewewa Barat. “Kami berharap bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan anak-anak kami dari kebun ini,” ungkap Naomi Milla, istri

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi www.wlf.or.id

URGENSI PENGEMBANGAN TRANSFER ANGGARAN PROVINSI BERBASIS EKOLOGI (TAPE) DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah

Oleh

MARYAM & ADE NURIADIN



Provinsi Sulawesi Tengah memiliki wilayah hutan yang cukup luas. Sekira 4,4 juta hektar atau 64 persen dari luas wilayah provinsi ini adalah hutan. Sulawesi Tengah juga termasuk ke dalam 10 provinsi di Indonesia dengan wilayah hutan lindung terluas, yakni tak kurang dari 1,3 juta hektar persegi. Provinsi ini dikaruniai beragam jenis flora dan fauna, beberapa di antaranya endemik.

Walaupun memiliki wilayah hutan yang luas, hasil kajian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa provinsi ini berpotensi mengalami krisis air bersih di masa depan. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulteng Periode 2021-2026 menyebutkan sekitar 13,95 persen daerah di Sulteng tidak mampu menyediakan air bersih secara mandiri.

Selanjutnya, kemampuan Sulteng dalam menyediakan pangan secara mandiri bagi penduduknya telah terlampaui 2,59 juta hektar dari 3,55 juta hektar atau proporsinya terlampaui 42,32 persen. Pada daerah tertentu, seperti Kabupaten Banggai, Parigi Moutong, Poso, Morowali Utara, dan Donggala berpotensi mengalami krisis pangan bila tidak segera diantisipasi.

Hasil Kajian Tingkat Kerentanan oleh Tim KLHSRPJMD Provinsi Sulteng yang merujuk pada Sistem Informasi Indeks dan Data Iklim (SIDIK) menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada kerentanan sosial ekonomi masyarakat di mana kategori kerentanan tinggi terjadi di Kabupaten Banggai (36 persen), Kabupaten Parigi Moutong (30 persen), Buol (13 persen), dan Donggala (10 persen).

Persoalan lain yang juga dihadapi di Sulteng ialah konflik yang terjadi antara perusahaan baik itu perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Air (PLTU/A) dengan masyarakat yang masih cukup tinggi terjadi.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng pada Tahun 2020 paling tidak terjadi 9 kasus konflik yang terjadi. Konflik terjadi disebabkan oleh terjadinya penyerobotan lahan warga oleh perusahaan. Atas dasar kondisi lingkungan hidup yang sudah rusak dan terancam, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan upaya perbaikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengadopsi skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis kinerja Ekologis (TAPE).

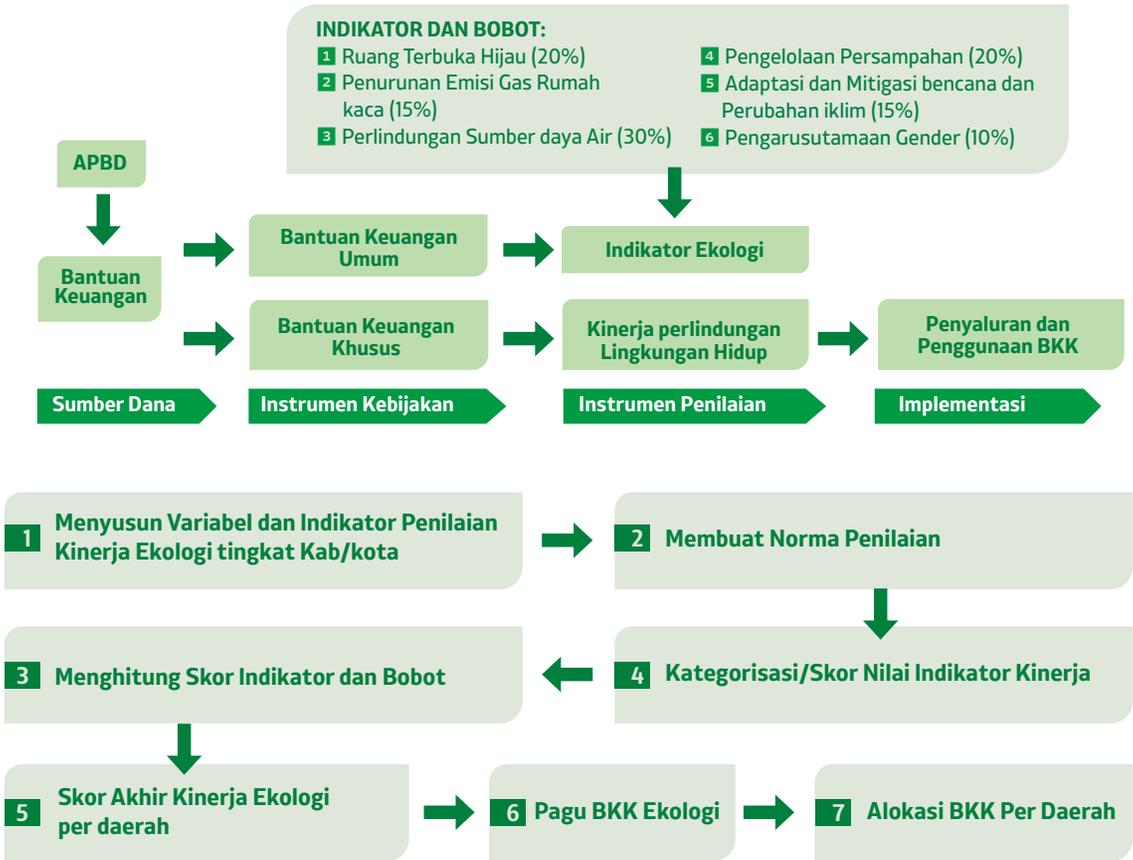
Mengapa TAPE?

Kondisi lingkungan hidup di Sulteng sudah rusak dan terancam. Sulteng Masih memiliki 4,3 juta hutan alam yang perlu diselamatkan. Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercantum pada Misi ke 6 RPJMD Sulteng 2021-2026 yakni menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-6 itu adalah: meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; meningkatkan pengelolaan hutan yang berkualitas; mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana; dan mewujudkan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Komitmen Pemda Sulteng hanya dapat dilihat pada tataran peraturan perundang-undangan saja, namun pada realisasi anggaran Lingkungan Hidup di Sulteng membuktikan hal sebaliknya yang dapat dilihat dalam realisasi anggaran lingkungan hidup tahun 2020 sebesar 10 milyar atau setara 0,02 persen dari APBD Sulteng Tahun Anggaran 2020.

Jika ingin mencapai target pembangunan pada Misi ke 6, maka Pemda Sulteng perlu melakukan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya perbaikan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme

GAMBAR 1 USULAN KERANGKA KERJA TAPE SULTENG



pemberian bantuan keuangan khusus berbasis kinerja Lingkungan Hidup. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dalam ketentuan Pasal 67 terkait belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada kabupaten/kota dalam rangka tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya dimaksudkan dengan memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Skema bantuan keuangan berbasis kinerja termasuk dalam kategori tujuan tertentu lainnya. TAPE sebagai instrumen dapat menjadi strategi percepatan pembangunan di Sulteng yang selaras dengan misi ke 6 terkait pembangunan berkelanjutan di Sulteng.

Konsep TAPE

Ecological Fiscal Transfer (EFT) merupakan transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya dalam yurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup. EFT memiliki 4 skema yaitu Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE).

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) adalah konsep atau model pengalokasian bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kinerja bidang lingkungan hidup kabupaten/kota yang

ditingkatkan. Kebijakan transfer fiskal haruslah didesain dengan mempertimbangkan dampak ekologi, ekonomi, dan sosial.

Skema EFT (terdiri dari TAPE, TAKE dan ALAKE) saat ini telah diterapkan di 17 daerah di Indonesia (2 Provinsi menerapkan skema TAPE, 14 Kabupaten yang menerapkan skema TAKE, dan 1 Kota yang menerapkan skema ALAKE). Di Sulawesi Tengah sendiri, dua kabupaten telah menerapkan skema TAKE yaitu kabupaten Sigi dan kabupaten Tolitoli, sementara untuk skema ALAKE di Kota Palu masih dalam proses pengembangan bersama Pemda Kota Palu dan Jaringan Masyarakat Sipil.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki regulasi mengenai bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yaitu Pergub No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota. Pergub tersebut mengatur mengenai skema Bantuan Keuangan Umum (BKU) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Tiga tahun terakhir, Pemda Sulteng telah menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota di Sulteng sebanyak 67,6 milyar dengan rincian tahun 2019 sebesar 18,2 milyar rupiah, tahun 2020 sebesar 41,1 milyar rupiah, tahun 2021 sebesar 8,3 milyar rupiah, dan tahun 2022 sebesar 8,6 milyar rupiah.

Meskipun Pergub 12/2019 tersebut mengatur mengenai BKU dan BKK, namun bantuan keuangan yang disalurkan oleh Pemda Provinsi Sulteng belum menerapkan bantuan berbasis insentif kinerja bagi kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sulteng. Dengan demikian Skema TAPE dapat diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan skema bantuan keuangan khusus.

Pemda Sulteng dapat melakukan reformulasi skema bantuan keuangan dengan menambahkan alokasi kinerja lingkungan hidup kabupaten/kota yang akan menjadi dasar pengalokasian bantuan keuangan setiap tahunnya. Alokasi kinerja ini tidak menambah beban anggaran baru, melainkan melakukan reformulasi alokasi anggaran bantuan keuangan yang sudah ada. Alokasi kinerja menggunakan indikator

ekologi untuk menilai kinerja lingkungan hidup kabupaten/kota di Sulteng. Oleh karena itu, penerapan skema TAPE di Sulteng dapat dilakukan dengan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2019 dan melakukan reformulasi pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus dengan memasukkan alokasi kinerja berbasis ekologi.

Ada lima manfaat penerapan TAPE bagi pemerintah provinsi, yaitu: meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan lingkungan hidup; membuka peluang mendapatkan insentif dari pemerintah pusat dan non-pemerintah; membuka peluang kerja sama pemerintah daerah dan swasta; mendukung program strategis pemerintah provinsi yaitu pembangunan rendah karbon; pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan; dan meningkatkan kinerja lingkungan hidup kabupaten/kota dan akan berdampak juga terhadap Provinsi Sulawesi Tengah.

Rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut. **Pertama**, Gubernur Sulawesi Tengah melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dengan memasukkan Bantuan Keuangan Khusus alokasi kinerja sebanyak 10% dari total Bantuan Keuangan per tahun.

Kedua, membentuk Tim Pembahas dan Penyusun skema TAPE Sulawesi Tengah yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil.

Merumuskan indikator penilaian kinerja sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di Sulteng. Adapun indikator yang menjadi usulan yaitu: ruang terbuka hijau; penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; perlindungan sumber daya air; mengelola sampah; melakukan adaptasi dan mitigasi bencana perubahan iklim; dan memastikan pengarusutamaan gender.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Policy Brief yang diterbitkan Yayasan Sikola Mombine dan dapat dibaca pada link berikut.

<https://yayasansikolamombine.org/wp-content/uploads/2022/09/Policy-Brief-Urgensi-Pengembangan-TAPE-SULTENG.pdf>



KESEHATAN MENTAL PUNYA PERANAN BESAR DALAM PEREKONOMIAN KITA MEMBUTUHKAN TOLAK UKUR SELAIN PDB

Oleh **RAPHAEL GUNAWAN HASUDUNGAN, ANDREA NATALIE NATSKY, JO-AN OCCHIPINTI**

Di tengah ancaman resesi global, perekonomian Indonesia bisa dikatakan tumbuh dengan baik. Indonesia mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) – basis ukur perekonomian negara berdasarkan nilai produksi dan penjualan barang dan jasa selama periode tertentu – sebesar 5,3% pada 2022, dibandingkan 3,7% pada tahun sebelumnya.



Foto: ILO East Asia & Pacific

Ini pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia, mengingat hampir semua anggota G20 lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kinerja mereka pada 2021.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah indikator yang ideal untuk mengukur kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia bertengger di peringkat 87 dari 146 negara pada Indeks Kebahagiaan Dunia 2022 keluaran *Sustainable Development Solutions Network* yang diluncurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indeks ini disusun berdasarkan survei kepuasan hidup. Peringkat Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN lain seperti Singapura (27), Filipina (60), Thailand (61), Malaysia (70) dan Vietnam (77).

Padaahal, emosi positif seperti perasaan bahagia dan sejahtera memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental dan produktivitas dalam pekerjaan.

Kesehatan mental merupakan faktor penting dalam produktivitas. Meskipun prospek ekonomi Indonesia tampak menjanjikan, kesehatan mental sebagai faktor yang penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masih kerap diabaikan.

Bagaimana kesehatan mental mempengaruhi perekonomian

Orang dengan tingkat stres menengah hingga tinggi kerap mengalami penurunan produktivitas dan memerlukan lebih banyak perawatan kesehatan. Hal ini berujung pada meningkatnya beban ekonomi sosial.

Pada 2020, tahun pertama pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan adanya kenaikan prevalensi kecemasan dan depresi hingga 25 persen di seluruh dunia.

Angka ini cukup mengkhawatirkan. Masalah kesehatan mental dapat menyebabkan individu untuk absen dari pekerjaan atau sekolah (*absenteeism*), atau hadir di tempat kerja tanpa bisa berfungsi dengan baik (*presenteeism*) – dan berujung pada hilangnya produktivitas.

Uni Eropa, misalnya, mencatat kerugian US\$430 miliar (6.424 triliun rupiah) akibat penurunan produktivitas pada 2012. Sementara, Australia kehilangan hingga US\$27 triliun akibat *presenteeism* dan *absenteeism* pada 2019.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa 20 persen populasi berisiko mengidap masalah kesehatan mental. Pada 2022, penelitian Indonesia *National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS) melaporkan bahwa pada kelompok remaja saja (usia 10-17 tahun) – artinya bahkan sebelum mereka umumnya memasuki lapangan kerja-satu dari tiga di antaranya sudah mengalami masalah kesehatan mental. Sementara itu, 1 dari 20 remaja terdiagnosis memiliki gangguan kejiwaan pada setahun ke belakang.

Sejauh ini, belum ada perkiraan berapa banyak kerugian yang ditanggung Indonesia akibat hilangnya produktivitas. Namun, kami menduga bilangannya kemungkinan cukup tinggi.

Hilangnya produktivitas akibat masalah kesehatan mental berpotensi meniadakan perolehan produktivitas yang berasal dari populasi muda Indonesia.

Fakta bahwa hanya 9 persen dari penderita depresi di Indonesia memiliki akses terhadap perawatan yang dibutuhkan, berdasarkan sebuah penelitian pada 2020, sudah seharusnya menjadi keprihatinan nasional.

Kemakmuran Lebih dari Sekadar PDB

Terlepas dari potensi beban ekonomi dan sosial yang begitu besar akibat gangguan kejiwaan, WHO memperkirakan bahwa hanya 2 persen dari anggaran kesehatan Indonesia dialokasikan untuk mengatasi isu kesehatan mental.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari manajemen perekonomian yang baik, penting bagi Indonesia untuk mempromosikan investasi dan kebijakan khusus demi menanggulangi masalah kesehatan mental.

Terkait hal ini, beberapa negara telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan *wellbeing economy* – kerangka ekonomi yang berfokus pada bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan kemakmuran negara. Dalam kerangka ini, kebutuhan dasar masyarakat menjadi tujuan yang perlu diutamakan.

Membangun *wellbeing economy* memerlukan kebijakan yang terkoordinasi di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Hal ini juga memerlukan basis ukur baru karena sekadar PDB saja tak cukup untuk mengukur aspek-aspek tersebut.

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah menyusun kerangka kesejahteraan yang melingkupi berbagai indikator. Indikator-indikator ini termasuk – namun tak terbatas pada – keterlibatan sipil, keterhubungan sosial, kualitas lingkungan, keamanan, kesejahteraan subjektif, kesehatan, dan keseimbangan hidup dan kerja (*work-life balance*).

Senada dengan itu, Selandia Baru, Wales, Skotlandia, Finlandia, Islandia, dan Kanada telah

mengembangkan dan menambahkan anggaran dan pengeluaran mereka dengan pengukuran kesehatan, budaya, edukasi, lingkungan hidup, dan kualitas hidup.

Demi menerapkan pendekatan yang menyeluruh, Pemerintah Skotlandia, misalnya, mengadopsi 81 indikator untuk mengukur perkembangan mereka dalam mencapai *wellbeing economy*.

Namun, meski alat ukur ini cukup komprehensif, PDB masih menjadi indikator dominan untuk mengukur kemakmuran. Hal ini karena PDB memang menyediakan satu indikator yang menyeluruh bagi pemerintah untuk melacak kinerja mereka dalam mengelola perekonomian.

Dalam mengatasi tantangan ini, studi *Mental Wealth Initiative* dari University of Sydney di Australia telah menghasilkan alat ukur tunggal dengan cakupan yang luas untuk mengukur *wellbeing economy*. Alat ukur ini bertajuk “*Mental Wealth*” (kekayaan mental) karena menyadari pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan dalam mendorong kemakmuran ekonomi dan sosial.

Tidak seperti alat ukur lain yang tak menyertakan PDB, *Mental Wealth* tetap memasukkan indikator tradisional tersebut ke dalam pengukuran.

Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk beralih ke *wellbeing economy* demi meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan kemakmurannya secara sistematis agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Mengukur dan memantau *Mental Wealth* dapat membantu memetakan progres dan memberi masukan terhadap kebijakan yang mendukung transisi ini.

Jika kamu atau orang yang kamu kenal memiliki keluhan terkait kesehatan mental, hubungi hotline Halo Kemenkes di 1500-567.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari <https://theconversation.com/kesehatan-mental-punya-peranan-besar-dalam-perekonomian-kita-membutuhkan-tolak-ukur-selain-pdb-203412>

CARA YANG BISA DILAKUKAN UNTUK MENGHADAPI UDARA BURUK PENYEBAB PERUBAHAN IKLIM

Oleh **FINASTRI ANNISA**

Menurut data laporan IQair per tahun 2021 Indonesia menempati peringkat ke-17 sebagai negara dengan polusi udara yang tinggi di dunia. Indonesia juga menempati peringkat pertama sebagai negara dengan polusi udara tinggi se-Asia Tenggara. Polusi udara merupakan sebuah kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak, sebab terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang mengancam kesehatan tubuh manusia. Berdasarkan data WHO per tahun 2019 sembilan dari sepuluh orang di dunia menghirup udara yang tercemar setiap hari.

Dampak dari polusi udara cukup merugikan banyak hal. Tercatat 4,2 juta kematian terjadi setiap tahunnya disebabkan oleh polusi udara. Sebanyak 40.000 kematian anak balita setiap tahun akibat paparan PM2.5 dari bahan bakar fosil.



Kerugian ekonomi sebesar 8 miliar USD (berkisar 3,3% dari total PDB dunia) hilang setiap hari akibat berkurangnya harapan hidup, kelahiran prematur, penyakit yang mengakibatkan kunjungan ke rumah sakit dan kehilangan pekerjaan, serta beban keuangan akibat penyakit.

Keadaan udara buruk menurunkan tingkat kesehatan hingga produktivitas ekonomi. Selain memiliki efek jangka panjang, udara buruk juga menimbulkan masalah jangka pendek seperti bersin dan batuk, sesak nafas, sakit kepala, iritasi mata, dan pusing.

Polusi udara yang disebabkan oleh emisi metana, bahan bakar fosil, dan polusi udara fase gas, menjadi penggerak utama perubahan iklim. Polutan udara memiliki dua bentuk fisik: padat, partikel dan polutan fase gas. Polutan fase gas, seperti gas rumah kaca (GRK) terdiri dari metana, dinitrogen oksida, dan karbon dioksida. Polutan-polutan ini memasuki atmosfer bumi dalam konsentrasi yang cukup pekat. Sehingga menyebabkan sistem iklim planet kita berubah. Ketiga gas rumah kaca menyerap radiasi, mereka juga menjebak panas matahari dan menghentikannya memasuki ruang angkasa. Hal ini yang menciptakan efek rumah kaca. Efek yang secara perlahan meningkatkan suhu bumi.

Perbuatan positif kecil untuk lingkungan, bisa berdampak besar bagi bumi. Membenahi efek perubahan iklim tentu perlu kerja sama seluruh penduduk bumi. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kualitas udara yang buruk?

Mengurangi Jejak Karbon Pribadi

Setiap individu manusia menciptakan jejak karbon pribadi. Mulai dari penggunaan kendaraan, memasak, hingga mengkonsumsi rokok. Mengurangi jejak karbon pribadi akan membantu menurunkan kadar polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan transportasi umum, atau memilih jalan kaki dengan jarak yang dekat dibandingkan menggunakan motor atau mobil pribadi. Ketika membeli kendaraan, pilihlah kendaraan yang hemat bahan bakar atau menggunakan energi listrik. Mengurangi konsumsi makanan yang diolah dengan dibakar arang. Serta mengurangi konsumsi rokok.

Jaga Diri di Tengah Kondisi Udara Buruk

Butuh waktu yang panjang untuk memulihkan udara dari pencemaran. Oleh sebab itu, tetap gunakan masker penyaring partikel udara seperti masker N95, ketika sedang bepergian ke tempat dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Agar partikel berbahaya tidak mudah masuk dan menumpuk di dalam tubuh.

Bijak Dalam Menggunakan Bahan Bakar Bahan bakar batu bara saat ini masih menjadi sumber energi penghasil listrik di Indonesia. Pembakaran batubara menghasilkan emisi gas yang mencemari udara. Hemat energi listrik menjadi salah satu cara untuk menghadapi kondisi udara buruk. Semakin banyak orang yang menghemat listrik, maka pembakaran batu bara pun semakin bisa ditekan. Menghemat listrik dapat dilakukan dengan mematikan alat elektronik saat tidak dipakai, membeli barang elektronik yang hemat daya.

Mengatasi Polusi Udara dalam Ruangan

Kondisi udara di luar ruangan juga akan mudah memengaruhi kondisi dalam ruangan. Kita perlu mengatasi kebersihan udara dalam ruangan agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Cara mengatasi polusi udara dalam ruangan yaitu dengan meningkatkan jumlah ventilasi, agar terdapat sirkulasi udara yang lancar. Menggunakan pembersih udara (air purifier) yang hemat daya. Rutin membersihkan rumah dan alat-alat pembersih udara, kipas, ataupun pendingin ruangan. Hindari merokok di dalam ruangan, sebab partikel rokok akan menempel dan sulit untuk dibersihkan.

Mengelola Sampah Secara Mandiri

Sampah perlu dipilah dan dikelola dengan baik, dimulai dari rumah sendiri. Tidak membakar sampah adalah salah satu cara untuk mengurangi polusi udara. Mengelola sampah secara mandiri akan dapat mengatasi aksi bakar sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang kembali menjadi *ecobrick* atau barang daur ulang lainnya. Kita juga dapat berpartisipasi dalam

gerakan pemilahan sampah. Di mana sampah yang sudah dipisah dapat dijemput oleh komunitas yang memiliki program pengelolaan daur ulang.

Menanam di Rumah

Daun memiliki kemampuan fotosintesis yang unik. Alih-alih membutuhkan oksigen seperti manusia, daun menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen. Menanam tanaman dapat membantu untuk menyaring udara buruk yang ada di sekitar kita. Seandainya setiap satu atap rumah penduduk memiliki kelompok tanaman yang dirawat, atau setidaknya merawat satu pohon di depan rumahnya, tentu akan membantu dalam kontribusi memperbaiki kondisi udara.

Mengurangi Makan Daging

Sapi adalah hewan ruminansia yang memiliki sistem pencernaan poligastrik. Sebuah sistem pencernaan yang mana di dalamnya terdapat mikroorganisme yang memecah selulosa pada dinding sel tumbuhan, sehingga nutrisi dalam tumbuhan tersebut dapat diserap dan dimanfaatkan untuk proses metabolisme tubuh sapi. Dalam proses pemecahan selulosa, di dalam rumen terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas ini dikeluarkan melalui gas buangan (sendawa dan kentut) serta feses yang dikeluarkan oleh sapi. Semakin banyak jumlah daging sapi yang dikonsumsi, maka semakin meningkat pula pencemaran udara yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global.

Berpartisipasi dalam Mendorong Pemerintah dalam Membuat Kebijakan Ramah Lingkungan

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki andil dalam menegakkan kebijakan lingkungan. Hal ini berlandas Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan membuat jalur khusus sepeda. Dengan harapan dapat mendorong warga berkendara lebih banyak menggunakan sepeda dibandingkan kendaraan bermotor pribadi. Namun, jika dianalisis lebih

lanjut, ada banyak peluang program lingkungan yang bisa kita jalani. Tentunya Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki andil yang sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, menjadi bagian individu yang mendorong pemerintah mengesahkan kebijakan ramah lingkungan, menjadi hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan udara yang bebas dan nyaman dihirup.

Menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Kehidupan Sehari-hari

SDGs merupakan tujuan yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin dunia untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Terdapat empat pilar yaitu; pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan hukum dan tata kelola. Memahami konsep dan penerapan SDGs akan membantu kita untuk mempertimbangkan sikap apa yang harus diambil ketika menghadapi sebuah keadaan. Utamanya dalam sikap menjaga lingkungan dan peran apa saja yang bisa diambil untuk menyelamatkan bumi. Berbagai penelitian INFID tentang *Sustainable Development Goals* yang dapat diakses secara publik seperti yang berjudul *Seberapa Paham Warga Indonesia Kepada SDG? Dan Laporan Pelaksanaan SDGs di tiga daerah*.

Belum ada ditemukan planet lain seindah dan senyaman bumi untuk ditinggali. Namun, manusialah yang membuat berbagai kerusakan dengan eksploitasi hasil bumi serta membuat pencemaran lingkungan. Kepada manusia jugalah perbaikan ini harus dilakukan berkelanjutan. Saling mengisi dan bekerja sama untuk mengembalikan kembali keasrian bumi. Memilih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi udara buruk. Agar kita dan generasi selanjutnya masih dapat menghirup udara bebas dan sehat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://www.infid.org/publication/read/cara-yang-bisa-dilakukan-untuk-menghadapi-udara-buruk-penyebab-perubahan-iklim>

Kisah inspiratif kali ini hadir dari nelayan Tehoru, di Seram, Maluku Tengah. Mereka spesialis penangkap tuna secara alami dan berkelanjutan, tak seperti pelaku industri tuna di kawasan.

Juli 1979, seorang bayi laki-laki lahir di sebuah kampung pesisir pulau Seram, Maluku Tengah. Ia kelak dikenal dengan sapaan Pak Moh. Seorang nelayan pemancing tuna yang ulet. Rumahnya di sisi teluk tempatnya menambatkan perahu, dan berhadapan langsung dengan kaki gunung Binaya, juga dikenal dengan sebutan Gunung Nunusaku.

Nunusaku adalah gunung agung yang dijaga penduduk Kepulauan Maluku. Sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat pertama kali manusia turun ke Bumi lalu berpencar menghuni pulau-pulau kecil di Maluku.

Pak Moh rutin memandangi gunung itu antara pukul pukul tiga hingga empat dinihari, ketika dia mulai berjalan pelan ke perahu, lalu menaikkan semua perbekalannya. Ada tasi sebagai tali pancing, batu untuk pemberat, umpan cumi, cairan hitam cumi, dan makanan.

Beberapa nelayan di Tehoru kembali dari melaut mencari tuna dengan peralatan alami jelang pukul 14.00 WIT.

Foto: **Eko Rusdianto**



PARA NELAYAN MALUKU MEMBUKTIKAN INDUSTRI TUNA HARUSNYA TAK PERLU MERUSAK LINGKUNGAN

Oleh **EKO RUSDIANTO**



Saat penglihatan masih samar-samar, ratusan pemancing tuna membelah selat itu menuju arah laut Banda. Raungan mesin dengan kekuatan 15 PK membentuk busa di belakang perahu. Semua bergerak dalam harapan yang besar.

Pak Moh punya nama lengkap Muhammad Silawane, mewarisi marga dari wilayah bernama Tehore itu. “Saya ingat, sejak kecil saya sudah ke laut bersama bapak. Ikut memancing,” katanya.

Pak Moh seperti kebanyakan warga di kampung Tehoru, tak bisa lepas dari laut. Orang tuanya ingin dia bersekolah dan melanjutkan pendidikan agar bekerja di darat. Tapi sekolah membuatnya bosan, sementara laut selalu memanggil-manggilnya, terutama untuk menangkap tuna. Di Tehoru, nelayan pancing khusus tuna mencapai 500-an orang.

Dekade 1980-an akhir, dia ingat betul, nelayan di kampungnya hanya menggunakan perahu kecil dengan layar. Mereka mendayung ke tengah teluk dan mulai membuang mata pancing. Cakalang dan tuna masih mudah dijumpai dan didapatkan. Orang-orang di pesisir yang membutuhkan ikan hanya tinggal mengaso di bawah naungan pohon, lalu menunggu nelayan dan membeli hasil tangkapan.

Tapi semakin tahun, peruntungan memburuk. Ikan cakalang dan tuna mulai enggan masuk ke perairan. Nelayan generasi selanjutnya seperti Pak Moh terpaksa merogoh kocek lebih dalam atau mengajukan kredit ke bank untuk memperoleh pendanaan pembuatan perahu. “Tak ada pilihan, saya sendiri mengambil kredit di bank untuk perahu. Menabung bagi nelayan agak



sulit, karena setiap hari harus melaut,” ujarnya.

Di depan tambatan perahunya, kami duduk bersantai di atas pasir kerikil pantai yang hangat. Meneguk kopi dan meluruskan kaki. Tiba-tiba di kejauhan di lautan yang tenang itu, ada beberapa sirip ikan berbentuk segitiga yang nampak. Leher Pak Moh menegang, pandangannya mengawasi gerakan itu. “Lumba-lumba?” tanya saya.

“Iya, tapi itu bukan lumba-lumba yang baik. Itu Gajah Mina,” sahut Pak Moh.

Gajah Mina di wilayah seperti Bali, Flores dan beberapa kepulauan Maluku dianggap sebagai hewan mitologi. Wujudnya kerap dijumpai di beberapa Makara, atau patung dalam kepercayaan Hindu. Di Sumatera pada era kedatuan Sriwijaya, Makara Gajah Mina ini perwujudannya ditampilkan dengan badan berbentuk ikan dan memiliki belalai seperti gajah, yang dianggap sebagai penguasa lautan.

Berbeda dengan Tehoru. Nelayan setempat meyakini Gajah Mina bukanlah binatang mitologi, melainkan jenis mamalia laut. Dalam buku seri identifikasi hewan laut yang diterbitkan

Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia para nelayan menemukan gambar Gajah Mina itu. Nama latinnya *Grampus griseus* atau *Risso's dolphin*.

Risso's dolphin memiliki panjang maksimum 3,8 meter. Sirip punggung yang tinggi dan melengkung seperti sabit. Sementara kepala membulat, dan tak memiliki paruh. Lumba-lumba ini juga diketahui sebagai satu-satunya dari genus *Grampus* yang dekat kekerabatannya dengan Paus Pilot serta Paus Pembunuh.

Bagi nelayan di Tehoru, Risso atau Gajah Mina dianggap sebagai ikan ‘pencuri’. Hidup berombongan dan selalu mendekati nelayan untuk mengambil hasil pancingan. “Kalau pancing sudah dapat tuna, atau ikan lain. Gajah Mina itu selalu duluan mengambilnya,” kata Pak Moh.

“Jadi kalau ikan sudah kena pancing, itu kan tidak bisa banyak bergerak karena ada tasi. Ikan tidak bebas berenang. Nah itu Gajah Mina itu akan lebih cepat ambil,”

“Kita juga mau turun ke laut, bahaya. Bisa



Rizal (32 tahun) seroang nelayan membersihkan ikan di pesisir pantai Desa Tehoru (kiri) Fadlan Silawane, memperlihatkan hasil pancing ikan merah di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah (kanan) Foto-foto: **Eko Rusdianto**

juga digigit.”

Bagi nelayan, bertemu Gajah Mina di lautan berarti pertanda sulit mendapatkan ikan. Gajah Mina yang hidup dalam kawanan dan menyebar untuk memburu, juga membuat ikan menghindari. Pada 27 November 2022, inilah yang dirasakan puluhan nelayan pancing tuna di Tehoru. Mereka yang mulai melaut pada dini hari, harus pulang ke daratan menjelang siang dengan tangan hampa. “Mau bagaimana lagi. Mau usir atau mau bunuh juga tidak selesaikan masalah. Jadi pulang istirahat,” kata La Tohia nelayan lainnya.

La Tohia lahir tahun 1981. Dia menjadi pemancing tuna sejak usia SMP. Nelayan tua di Tehoru mengajarkannya, jika Gajah Mina juga memerlukan hidup. Nelayan tak boleh mengganggunya, sebab sama seperti manusia,

mamalia laut itu mencari makanan. “Ya mungkin dua atau tiga hari, Gajah Mina akan berpindah cari tempat makan lagi. Ikan itu tidak selamanya di sana,” katanya.

Bagi La Tohiah, kunci menjadi nelayan adalah menjadi sabar. “Kalau suasana hati sedang tidak bagus, banyak masalah. Rezeki di lautan juga seperti itu. Jadi nelayan itu harus ke laut dengan senang karena untuk bekerja,” tandasnya.

Keberlanjutan Jadi Kunci Bertahan di Tehoru

Menjauhnya ikan membuat wilayah pencarian ikut terpengaruh. Rata-rata setiap nelayan pemancing tuna, dalam sekali jalan dari dinihari hingga jelang pukul 17.00 menghabiskan antara 600 ribu rupiah hingga Rp800 ribu menjangkau jarak sekitar 10 mil.

Biaya terbesar membeli bahan bakar jenis pertamax, di mana harga setiap liternya kini dipatok 14.200 rupiah untuk kawasan Maluku. Perahu mesin 15 PK sekali trip menghabiskan sekitar 40 liter. Nelayan Tehoru sudah kerap mengeluhkan kelangkaan bahan bakar yang lebih

terjangkau dari Pertamina, tapi tak ada jalan keluar dari otoritas yang berwenang.

Terlepas dari persoalan bahan bakar, sebetulnya cara memancing nelayan tuna di Tehoru merupakan praktik ramah lingkungan yang layak dipuji. Pancing ulur mereka tidak menggunakan banyak mata kail, apalagi pukat harimau yang merusak ekosistem. Mereka memakai satu bentangan tasi satu kail, dengan cumi-cumi sebagai umpan.

Para nelayan melilit potongan umpan cumi itu di sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa. Di ujung lilitan yang menempel di batu, nelayan membuat simpul lepas, lalu batu itu ditenggelamkan ke perairan. Kedalamannya bisa mencapai 30 meter.

Ketika nelayan sudah memperkirakan kedalaman yang dibutuhkan, dari atas kapal, nelayan menghentak tali pancing agar lilitan di batu terlepas. Setelah itu, nelayan tak memegang pancingnya untuk merasakan gigitan ikan, melainkan membuang kotak gabus yang menjadi ujung tasi ke lautan. Dalam sekali trip, setiap nelayan, rata-rata membawa sekitar 30 sampai 50 batu sebagai pemberat umpan.

Bagi nelayan, praktik pancing dengan tidak banyak berpindah dan menggunakan batu sebagai pemberat ini dilakukan ketika bahan bakar mulai mahal. Sebelumnya, praktik yang dilakukan adalah memancing dengan memperhatikan gerakan lumba-lumba, nelayan akan mengejar rombongan mamalia laut di belakang dan membuang kail. "Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan, karena kehabisan bahan bakar di tengah lautan," kata La Tohia.

Praktik lainnya adalah menggunakan layang-layang. Umpan tali pancing akan diikatkan di layang-layang dan nelayan akan menerbangkannya di tengah lautan. Sayangnya praktik ini juga menguras bahan bakar.

Bagaimanapun, ikhtiar nelayan tuna untuk tetap ramah lingkungan membuahkan hasil. Tuna tangkapan nelayan di Tehoru, yang sekian tahun terakhir turut didampingi MDPI, mendapatkan logo Fair Trade, dan telah didistribusikan di sekitar 1.200 toko di Amerika Serikat. Ini sertifikasi yang sulit diraih

kebanyakan nelayan Asia Pasifik. Sebab, syarat memperolehnya adalah seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perdagangan tuna ini wajib berlangsung adil serta berkelanjutan. Khususnya bagi si nelayan dan komunitasnya.

Ini kabar menggembirakan, terlebih karena industri tuna secara global punya reputasi miring. Tuna terancam punah karena obsesi konsumen di berbagai negara. Proses penangkapan dan pengolahannya juga sangat buruk. Penelitian pada 2018 menunjukkan di Asia Tenggara, mayoritas nelayan dan produsen tuna melakukan praktik pemancingan ilegal, merusak rantai ekosistem, bahkan terindikasi melibatkan perbudakan manusia. Artinya, capaian di Tehoru ini terhitung langka.

Sertifikasi itu cukup membanggakan nelayan Tehoru, meski dengan sedikit catatan. Para nelayan Tehoru tidak menjual ikan tuna dengan sistem gelondongan per ekor, tapi dengan memisahkan daging dengan bentuk fillet. Rata-rata nelayan mendapatkan tuna satu ekor sebesar 14 kilogram, yang jika dikemas fillet, menjadi sekitar 8 sampai 9 kilogram.

Setiap bulan, nelayan tuna akan melakukan trip antara 15 hingga 20 hari. Dan jika dikalkulasi keuntungan rata-rata nelayan setiap bulan, berkisar antara 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. "Tapi keuntungan itu tidak kelihatan langsung setiap bulan. Karena dalam satu waktu, bisa saja tidak dapat ikan. Atau hanya satu ekor. Jadi simpanan awal akan diambil kembali untuk membeli perbekalan," kata Pak Moh.

"Jadi bayangkan kalau tiga kali trip tidak dapat apa-apa? Bisa tidur di perahu, tidak pulang ke rumah, karena simpanan juga sudah habis. Makanya ada nelayan yang terpaksa mengutang untuk modal,"

"Tapi menjadi nelayan masih tetap baik, jika harga stabil."

Fadlan Silawane merasakan bagaimana menjadi nelayan masih menjanjikan. "Dulu saya kerja di kantor, tidak bisa punya rumah hanya kontrak. Sekarang sudah bisa bangun rumah sendiri," katanya.

Fadlan berusia jelang 40 tahun. Dia adik Pak

Moh. Sebelumnya dia bekerja di kantor pajak di Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagai tenaga kontrak selama 16 tahun, dia mengaku tak bisa menanggung hidup istri dan tiga orang anaknya hanya dengan gaji kurang dari Rp4 juta kala itu.

Tahun 2018, dia memutuskan kembali ke kampung di Tehoru. Dia ikut belajar ke Pak Moh, bagaimana cara memancing tuna. “Di Kalimantan, kerajaannya banyak dalam ruangan dan berpendingin udara. Di laut bila hujan akan kena hujan, panas juga begitu,”

“Belum lagi badai. Kulit juga sudah sangat gelap karena terbakar. Tapi menjadi nelayan, jauh lebih bebas.”

Sayangnya tetap ada satu noktah hitam. Setiap nelayan di Tehoru meyakini usia dan produktivitas nelayan paling banter cuma sampai 55 tahun. Setelah itu energi dan kepiawaian melaut berkurang. “Ini yang berbeda dari petani. Petani menanam sekarang, akan bisa menikmati hasil tanamnya sampai dia tua dan bahkan tidak bisa bekerja lagi,” kata Fadlan.

“Kalau nelayan, kalau sudah tua istirahat tidak bisa lagi ke laut. Apa yang diwariskan ke anak? Ya keterampilan. Jika tak ada generasi yang menjadi nelayan, ya garis keluarga itu akan selesai dalam dunia nelayan.”

Cinta Pada Laut di Tehoru

Bagi nelayan, membicarakan laut adalah membicarakan halaman mereka bertumbuh dan mencari nafkah. Laut yang tenang dan bergejolak adalah bagian dari siklus yang tak bisa diubah. “Jadi kami nelayan hanya mempelajarinya. Kalau kenal laut, berarti kenal juga tempat bekerja,” kata Pak Moh.

Saya meminta beberapa nelayan berbicara mengenai petuah penting bekerja sebagai nelayan. Salah satu yang menggelitik: berhubungan seks dengan istri sebelum ke laut bisa meningkatkan keberuntungan saat mencari ikan.

Alasan mereka sederhana, istri yang ditinggalkan di rumah merasa senang dan suami yang ke laut juga bahagia. Di pesisir Tehoru, dari pagi hingga sore, saya menyaksikan anak-anak nelayan itu bermain. Apakah mereka generasi

yang pembuahannya direncanakan pada dini hari sebelum orang tuanya melaut? Pak Moh, tertawa mendengar ungkapan itu.

Pada 28 November 2022, di pesisir Tehoru, seratusan anak desa dari usia Sekolah Dasar, SMA, hingga pemuda, menyisir pantai dan mengumpulkan sampah yang tak bisa terurai agar tak mengotori lautan. Mereka dengan antusias, memasukkannya dalam kantong sampah dan membawanya ke bank sampah desa.

Di saat bersamaan, beberapa anak berlarian mengejar layangan yang putus agar tidak jatuh ke laut. Seorang anak kemudian memperhatikan arah angin dan memilih tempat terbaik. Celananya basah, tapi dia berhasil menangkap layangan itu.

Di sisi pantai yang lain, di waktu yang sama, seorang lelaki menggendong anak perempuan yang bertelanjang. Dia turun dengan pelan dan membenamkan badannya di lautan. Anak perempuan itu memeluk si lelaki. Lalu tangan lelaki itu membasuhkan air laut itu ke kepala si anak. Dia membuka ikatan rambut, dan terus melakukannya. Seperti ritual.

“Di Tehoru kami lakukan banyak hal di laut. Anak-anak bermain, orang tua bermain. Laut juga adalah obat untuk beberapa penyakit,” kata Pak Moh.

Tak heran, Pak Moh kemudian dengan sukarela bergabung dalam kegiatan bersih pantai itu. Dia menunjuk tumpukan popok bayi dan beberapa sampah plastik. “Kalau pantai kotor, bagaimana anak-anak bermain. Kalau kotor, kalau mandi, pasti akan sakit, pasti gatal,” katanya.

Sampah akibat ulah manusia, kata La Tohia, mungkin alasan beberapa ikan tak masuk lagi ke teluk. “Pesisir masih kelihatan bersih. Tapi coba berenang ke sana, di bawah dasar itu, segala rupa sampah sudah ada,” katanya menunjuk lautan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari VICE Indonesia dan dapat dibaca pada link berikut <https://www.vice.com/id/article/pkg9xy/nelayan-tuna-di-tehoru-pulau-seram-maluku-tengah-berhasil-mendapat-sertifikat-fair-trade-karena-praktik-pancing-berkelanjutan>

Laporan ini turut didukung oleh Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI)

Penulis adalah jurnalis lepas yang bermukim di Makassar.

MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh **MAHARANI**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini yang mengusung pembangunan berkelanjutan harus pula disertai dengan pemahaman secara menyeluruh mengenai isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Pemahaman mengenai ini tidak bisa diabaikan, karena marwah dari pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak akan terwujud apabila kondisi pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai, khususnya terhadap kelompok rentang dan/atau marjinal. Untuk itu, dibutuhkan kesepahaman dan pemahaman semua pihak untuk dapat menjadikan inklusi sosial dan prinsip gender sebagai pondasi program pembangunan yang dilaksanakan.



Saat ini Indeks Pembangunan Gender (PGI) Kabupaten Lombok Timur berada pada angka 91,3 dan berada di atas rata-rata provinsi yaitu 90,5 atau berada di posisi keenam dari sepuluh daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Lotim masih berada di posisi keempat dengan angka 65,9. Dalam periode 2019-2021, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Lombok Timur cenderung mengalami stagnasi meskipun terdapat kenaikan (BPS, 2022)



Foto: Yusuf Ahmad/Wayasan Bakti

Ketenagakerjaan dan Pendidikan

Berdasarkan data Survei Ketenagakerjaan Nasional menunjukkan dalam kurun waktu tiga tahun, tingkat partisipasi kerja perempuan cenderung stagnan berada dalam angka 45 persen, masih berada di bawah angka dari laki-laki yang mencapai 55 persen.

Mayoritas perempuan di Lombok Timur bekerja di sektor informal dengan presentase terbesar di sektor pertanian, perkebunan dan, perikanan sebesar 30 persen dan sektor perdagangan sebesar 29 persen (BPS, 2022).

Kesenjangan ini tidak hanya terlihat dari angkatan kerja dan sektor saja namun, dari sisi upah yang diterima perempuan juga menunjukkan menerima lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yaitu perempuan menerima rata-rata 64 persen dari upah laki-laki (BPS, 2022).

Kesenjangan dalam sektor ketenagakerjaan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan rata-rata perempuan di Lombok Timur mengenyam pendidikan dasar, yaitu sebesar 33,51 persen. Sementara untuk sektor

kesehatan, sampai saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Lombok Timur mencapai angka 183 per 100.000 kelahiran.

Secara nasional, penyebab AKI adalah perdarahan yang dialami perempuan pasca melahirkan. Perdarahan erat kaitannya dengan anemia yang disebabkan asupan gizi dan zat besi yang kurang tercukupi bagi perempuan. Hal lainnya, perempuan masih terkendala atas akses terhadap program dan layanan kesehatan yang ada.

CSO Sebagai Mitra Pembangunan

Diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk dapat mengurangi kesenjangan gender serta mendorong lebih banyak partisipasi perempuan maupun kelompok rentan dan/atau marjinal dalam program pembangunan di Lombok Timur. Pemerintah daerah serta berbagai CSO (*Civil Society Organization*) yang ada di Lombok Timur harus mampu membangun suatu kolaborasi yang positif untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan atau SDG's harus semua indikator yang ada didalamnya dapat tercapai. Kesetaraan gender dan inklusi menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai di dalam SDG's tersebut.

Untuk itu sebagai salah satu CSO yang ada di Lombok Timur, Lombok *Research Center* (LRC) terus mendorong adanya pelibatan perempuan serta kelompok rentan dan/atau marjinal dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Namun tentunya dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan tersebut harus memuat rencana integrasi perempuan dan kelompok rentan dan/atau marjinal. Bukan hanya sebagai syarat untuk memenuhi kuota saja atau bahkan hanya sebagai pelengkap penulisan dokumen proposal program pembangunan.

Dalam mencapai kondisi tersebut maka, dibutuhkan suatu perspektif inklusi untuk

mewujudkannya. Inklusi sosial tidak hanya bermakna penerimaan terhadap semua kelompok, namun juga memiliki kandungan filosofis kebersamaan yang artinya penerimaan saja tidak cukup, namun juga harus ada pelibatan dan partisipasi yang dapat meningkatkan kapasitas setiap individu. Perspektif ini tentunya mencakup sikap dan nilai yang terimplementasi dalam setiap tindakan dan perilaku. Sementara gender merupakan elemen wajib yang juga musti mengkristal dalam perspektif, sikap dan tindakan, demi terwujudnya tujuan besar keadilan dan kesejahteraan yang proporsional.

Pembangunan yang berspektif inklusi dan kesetaraan gender akan dapat mengurangi berbagai bentuk perampasan atau kehilangan hak dan kesempatan. Pembangunan yang tidak memiliki perspektif inklusi dan kesetaraan gender akan berdampak pada rendahnya status sosial dan tingkat pendapatan, terbatasnya akses pada kesempatan kerja maupun terhadap layanan dasar, bahkan seringkali berdampak terhadap tidak adanya suara ataupun pelibatan dalam pengambilan keputusan.

Untuk itu sebagai mitra pembangunan, LRC akan terus melakukan kolaborasi positif dengan Pemda Lombok Timur terkait dengan program-program pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada pentingnya mengintegrasikan inklusi sosial dan gender dalam setiap perencanaan program pembangunan di Lombok Timur dan menjadi pintu masuk untuk melaksanakan pembangunan yang menghargai prinsip-prinsip kemanusiaan. Semua pihak harus dapat terangkul dalam setiap program pembangunan serta dapat merasakan manfaat dari setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Lombok Timur.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari

Artikel ini bersumber dari <https://lrcfoundation.com/mendorong-pembangunan-berkelanjutan-dan-inklusi-di-kabupaten-lombok-timur/>



DISKUSI ONLINE LIVE

Instagram Story @infobakti



Mobilitas Orang Pulau Kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan pesisir, memiliki sejumlah pulau-pulau berpenghuni. Bagaimana Kota Makassar mengendepankan mobilitas publik yang rendah emisi berdimensi GESI yang berkelanjutan menuju pembangunan rendah emisi yang lebih aman, inklusif dan tangguh dengan memperhitungkan orang pulau Kota Makassar yang tingkat mobilitasnya sangat tinggi?

Instagram Live Story ini merupakan kerja sama Vital Strategies dan PT Bahana Kreasi Inti



Makassar dan Gagasan Dewan Transportasi

Makassar pernah memiliki Dewan Transportasi Kota. Visi pembentukan penting dibicarakan kembali oleh warga Makassar. Jika diwujudkan, gagasan gagasan apa yang perlu dibagikan terkait pembentukan Dewan Transportasi Makassar?.

Instagram Live Story ini merupakan kerja sama Vital Strategies dan PT Bahana Kreasi Inti

Selengkapnya kunjungi <https://www.instagram.com/infobakti/channel>

Podcast BASUARA



Merawat Toleransi dengan Peacepreneurship

Kristi Praptiwi yang menjalankan Proyek “*peacepreneurship*” mempertemukan anggota kelompok pemuda Aliansi Kerukunan Antar-Pemuda Lintas Agama (AKAPELA) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk berkolaborasi dalam kampanye harmoni sosial melalui usaha kecil yang dipimpin oleh pemuda.

Menariknya *Peacepreneurship* mengharuskan peserta untuk berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang agama yang berbeda, misalnya untuk pendampingan usaha kecil.



Manusia Sehat, Alam Lestari

Yayasan Alam Sehat Lestari, NGO yang bergerak di bidang konservasi lingkungan di mana salah satu program utamanya adalah program Kesehatan, bernama KLINIK ASRI untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Satu dari hal menarik yang ASRI lakukan dimulai dari pendekatan masalah yang diselesaikan adalah melakukan ‘*Radical Listening*’ dan ini pula yang mendasari lahirnya Alam Sehat Lestari (ASRI).

Podcast BASUARA (BaKTI Pu Suara) adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

Artikel

Suara dari Kaki Rinjani

Amak Amrul sedang mengayunkan cangkul ketika ia mendengarkan seruan peringatan dari petani yang lain untuk segera bergegas. Pasalnya, beberapa alat berat yang dikawal oleh kepolisian mencoba untuk masuk ke lahan untuk meratakan lahan yang diklaim sebagai hak perusahaan, PT Sembalun Kusuma Emas (SKE).

Para petani Sembalun membentuk sebuah barikade barisan untuk mencegah alat berat tersebut hingga terjadi perdebatan yang alot antara petani dan pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa PT SKE telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, para petani tak bergeming: mereka menyampaikan bahwa tanah ini masih dalam proses konflik, sehingga tak selayaknya pihak perusahaan beraktivitas di atas lahan tersebut.

■ <https://batukarinfo.com/komunitas/articles/suara-dari-kaki-rinjani>

Publikasi Terbaru



Risalah Kebijakan: Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak masih menjadi masalah besar di Indonesia. Tingkat perkawinan anak memang terus menurun dalam dekade terakhir, tapi lajunya masih sangat lambat.

Sudah ada berbagai upaya pencegahan yang dilakukan, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pada pendidikan, dan perubahan norma sosial. Undang-Undang Perkawinan juga sudah diamandemen di tahun 2019 untuk menaikkan usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, seperti laki-laki. Namun, masih ada sepertiga dari pengajuan dispensasi perkawinan anak yang dilakukan karena kehamilan pada anak.

Analisis dan usulan kebijakan ini berfokus pada pentingnya upaya pencegahan perkawinan anak akibat kehamilan, serta penyediaan akses perlindungan dan tata kelola pelayanan kontinum bagi anak yang mengalami kehamilan hingga pasca kehamilan. Usulan kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024.

■ <https://batukarinfo.com/referensi/risalah-kebijakan-pencegahan-perkawinan-anak>

Berita Terbaru

Perempuan Semakin Tertatih Menuju Parlemen

Representasi perempuan dalam politik masih jauh dari harapan. Upaya mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen sulit terpenuhi. Regulasi turut membuat langkah perempuan semakin tertatih menduduki kursi parlemen.

Salah satu regulasi yang dipersoalkan adalah Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal ini menyebutkan, dalam penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah.

■ <https://batukarinfo.com/news/perempuan-semakin-terlatih-menuju-parlemen>